

Tabulasi Sementara Pemantauan Seleksi CPNS 2013
KLPC (Koalisi LSM Pemantauan CPNS)

I. Latar Belakang

Proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) selalu menjadi sorotan masyarakat luas. Sebab, seringkali proses ini diwarnai berbagai penyimpangan yang menjanjikan peserta lolos menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Berbagai modus penipuan pun digencarkan. Dari calo yang menawarkan jasa meluluskan dengan meminta imbalan uang, jasa joki yang menggantikan peserta untuk tes, hingga jual beli kunci jawaban tes CPNS.

Sayangnya, berbagai permasalahan tersebut seringkali tidak terungkap, karena tidak pernah ada tindakan tegas untuk menuntaskan kecurangan-kecurangan ini. Akibatnya, orang-orang yang mewarnai wajah birokrasi adalah mereka yang tidak kompeten dan berintegritas.

Reformasi birokrasi mutlak harus didukung proses seleksi pegawai yang dapat menyaring ketat calon-calon pegawai dengan kompetensi dan integritas. Diperlukan sebuah sistem yang mumpuni untuk mendapatkan calon-calon pegawai yang tidak berorientasi pada keuntungan ketika menjadi PNS, namun yang memiliki visi sebagai pelayan masyarakat. Sebab, seorang PNS akan selalu melayani publik.

Untuk mendukung reformasi birokrasi, mulai 2013 pemerintah juga sudah melakukan berbagai perubahan dalam sistem seleksi CPNS. Proses seleksi yang sebelumnya tertutup dan tidak akuntabel diubah menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta diberi ruang partisipasi bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Komitmen pemerintah meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan diikutsertakannya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman RI, serta Konsorsium LSM (ICW dan jaringan daerah) dalam panitia seleksi nasional CPNS (Panselnas).

Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) sebagai tim pengawas dalam Panselnas, berwenang ikut memantau setiap proses seleksi CPNS. Inilah bentuk partisipasi masyarakat sekaligus upaya memperkecil berbagai kecurangan dalam proses seleksi.

II. Tujuan

KLPC memantau proses seleksi CPNS dengan tujuan:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan rekrutmen CPNS
2. Mendorong proses rekrutmen CPNS yang bebas dari KKN
3. Menghasilkan pegawai negeri sipil yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang baik.

III. Wilayah Pemantauan

Pemantauan rekrutmen CPNS 2013 dilakukan di beberapa daerah, yaitu:

1. Medan, Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHDAR)
2. Malang, Malang Corruption Watch (MCW)
3. Makassar, Forum Informasidan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop)
4. Samarinda, POKJA 30
5. Serang, Masyarakat Transparansi Banten (MaTaBanten)
6. Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa Aceh)
7. Kendari, Pusat Studi Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Manusia (Puspaham)
8. Tasikmalaya, Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT)
9. Garut, Garut Governance Watch (GGW)
10. Tangerang, Serikat Guru Tangerang (SGT)
11. Buton Utara, LePPMI
12. Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW)

IV. Hasil Pemantauan dan pengaduan masyarakat

Kasus Berdasarkan Asal Laporan

No	Asal Laporan	Jumlah
1	Pemantauan dan Pos Pengaduan	61
2	Website	93
	Jumlah	154

Sumber : Data Olahan KLPC

Hingga 6 Januari 2014, KLPC telah menerima 154 pengaduan yang berhasil dihimpun dari pemantauan, laporan masyarakat melalui pos pengaduan, maupun laporan *online*. Sebanyak 61 aduan merupakan hasil pemantauan dan pengaduan masyarakat yang masuk melalui pos pengaduan. Sementara 93 kasus berasal dari pengaduan online melalui situs pantaucpns.net.

Kasus Berdasarkan Jalur Seleksi

No	Jalur Seleksi	Jumlah
1	Honorer K2	59
2	Umum	95
	Jumlah	154

Sumber : Data Olahan KLPC

Dari 154 kasus hasil pemantauan langsung, laporan masyarakat dan laporan online, sebesar 59 kasus menyangkut jalur honorer K2 dan 95 kasus menyangkut jalur umum. Data ini memperlihatkan bahwa laporan masyarakat terkait jalur umum lebih banyak dibandingkan jalur honorer K2. Hal ini dimungkinkan, sebab setelah pengumuman CPNS untuk jalur umum dilakukan, banyak laporan yang masuk terkait proses pengumuman. Sedangkan pengumuman kelulusan dari jalur honorer K2 belum dilakukan.

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa baik dalam seleksi jalur umum maupun K2 masih menyimpan banyak masalah. Meskipun permasalahan tersebut berbeda jenisnya, sebab sistem seleksi yang diterapkan juga berbeda. Untuk jalur honorer K2 menggunakan LJK, sedangkan untuk jalur umum menggunakan sistem CAT dan juga LJK. Laporan terkait jalur K2 umumnya terkait dengan pemenuhan syarat bahwa honorer adalah individu yang telah diangkat sejak tahun 2005.

Kasus Berdasarkan Tahapan Dilaporkan

No	Tahapan	Jumlah
1	Proses Pendaftaran & seleksi adm.	75
2	Pengumuman Kelulusan	40
3	TKD/TKB	27
4	lain-lain	5
5	Pengembalian LJK	3
6	Waktu Ujian	2
7	Distribusi Soal	1
8	Pemusnahan Soal	1
	jumlah	154

Sumber: Data Olahan KLPC

Dari 154 kasus, sebanyak 75 kasus terkait proses pendaftaran dan seleksi administrasi, sebanyak 40 kasus terkait dengan pengumuman kelulusan, sebanyak 27 kasus terkait proses TKD & TKB, sebanyak 5 kasus terkait hal lain-lain yang ditanyakan seputar rekrutmen CPNS, sebanyak 3 kasus terkait pengembalian LJK, sebanyak 2 kasus terkait waktu ujian, dan masing-masing 1 kasus terkait distribusi soal dan pemusnahan soal.

Jika dilihat dari 8 jenis tahapan yang dilaporkan maupun dipantau oleh KLPC, tahapan yang paling banyak diadakan dan ditemukan permasalahan adalah proses pendaftaran dan seleksi administrasi, yaitu sebanyak 75 kasus. Hal ini disebabkan, masa pendaftaran dan seleksi administrasi juga salah satu tahapan yang seringkali menjadi kesempatan bagi calo dan joki untuk menawarkan jasanya. Bentuk-bentuk kecurangannya adalah menutupi informasi seputar waktu pendaftaran, website pendaftaran tidak dapat diakses agar pelamarnya sedikit, dokumen administrasi dimanipulasi atau bahkan panitia meloloskan peserta yang sebenarnya tidak lulus administrasi.

Lima Belas Besar Kasus Berdasarkan Jenis Pengaduan

No	Jenis Pengaduan	Jumlah
1	Pengumuman kelulusan tidak transparan	37
2	Pendaftaran & seleksi adm. tidak transparan	21
3	K2 Tidak memenuhi syarat	18
4	Pemerasan/Penyuapan/Calo	16
5	Panitia tidak transparan	15
6	Pengawas lalai dan tidak kompeten	9
7	Naskah soal hilang dan cacat	6
8	Tempat ujian tidak kondusif	5
9	Ijazah palsu	4
10	Kekurangan dan Kehilangan LJK	4
11	penolakan lamaran	3
12	Mendaftar Lebih dari satu instansi	3
13	Manipulasi hasil ujian	2
14	pelamar tidak sesuai kualifikasi	2
15	Berkas adm. Hilang	1

Sumber: Data Olahan KLPC

Tabel diatas memperlihatkan lima belas besar jenis pengaduan dalam rekrutmen CPNS, terlihat bahwa, sebanyak 37 kasus terkait dengan pengumuman kelulusan yang tidak transparan, sebanyak 21 kasus terkait dengan pendaftaran dan seleksi administrasi tidak transparan, sebanyak 18 kasus terkait dengan K2 yang tidak memenuhi syarat, sebanyak 16 kasus terkait dengan pemerasan/peyuapan/calor dan 15 kasus terkait panitia yang tidak transparan.

Dari data diatas, yang perlu menjadi perhatian lebih adalah permasalahan kurang transparannya pengumuman kelulusan CPNS dan honorer K2 yang tidak memenuhi syarat. Sejak 24 Desember 2013, kementerian/lembaga dan daerah sudah mulai mengumumkan hasil kelulusan tes CPNS. Namun, informasi kelulusan tersebut seringkali kurang jelas dan menumbuhkan pertanyaan bagi peserta. Mengapa kemudian ada peserta yang nilainya lebih baik namun tidak lulus atau peserta yang nilainya pas-pasan dengan passing grade diluluskan. Selain itu, kurangnya transparansi ini juga terlihat dari informasi yang disampaikan kepada peserta. Di beberapa daerah, hanya nama saja yang di pajang atau nama dengan nomor peserta, sedangkan nilai tidak disebutkan. Kurang jelasnya informasi mengenai kelulusan ini membuat peserta bertanya-tanya seperti apa sebenarnya cara penilaian dalam proses seleksi CPNS.

Disisi lain, permasalahan tenaga honorer K2 juga banyak ditemukan. Hal ini karena, pertama, seorang tenaga honorer diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS melalui jalur honorer K2, apabila pada 31 Desember tahun 2005 minimal sudah menjadi tenaga honorer selama 1 tahun. Sehingga, tenaga honorer yang diangkat setelah tahun 2005 seharusnya tidak dapat mengikuti jalur K2. Kedua, tahun ini adalah terakhir pemerintah membuka jalur CPNS melalui honorer K2 sehingga persaingan yang tinggi akan terjadi antara pelamar dari pegawai honorer K2. Sebab tahun depan tidak akan dibuka lagi dan jika ingin menjadi PNS harus melalui jalur umum dimana peraturannya tidak boleh lebih dari 35 tahun ketika mendaftar. Oleh karena itu, yang sering ditemukan dilapangan, pelamar dari jalur honorer K2 memalsukan SK mereka agar dapat ditampung di jalur honorer K2.

Bahkan, orang-orang yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes melalui jalur honorer K2, beberapa tidak terdata.

Kasus Berdasarkan Instansi Yang Dilaporkan

No	Instansi	Jumlah
1	BKD Kab./Kota dan BKD Provinsi	50
2	Pemda/Pemkab/Pemkot	25
3	Sekolah/PT	12
4	MA	7
5	Kementan	4
6	DPR/DPRD	4
7	Kejaksaan	4
8	RSUD/Puskesmas	4
9	ESDM	3
10	Kemdikbud	3
11	Kemenkes	3
12	Pemprov	3
13	Kemenkumham	2
14	Kemenparekraf	2
15	Kemenag	2
16	LIPI	2
17	BPPT	2
18	Kemenpan	2
19	Kemendagri	2
20	Balai Bahasa	1

Sumber: Data Olahan KLPC

Dari 154 kasus, jika dilihat berdasarkan instansi yang dilaporkan, sebanyak 50 kasus menyebutkan BKD/BKN, sebanyak 25 kasus melaporkan Pemkab/Pemkot, sebanyak 12 kasus melaporkan PTN/sekolah, sebanyak 7 kasus melaporkan MA, sebanyak 4 kasus melaporkan Kementan.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa lembaga yang paling banyak dilaporkan maupun ditemukan masalah saat pemantauan adalah BKD Kab./Kota dan BKD Provinsi sebanyak 50 kasus. Hal ini tidak mengherankan, sebab BKD adalah instansi yang bertanggung jawab untuk menjadi panitia pengadaan CPNS di daerah dan bertanggungjawab atas kelancaran proses seleksi CPNS. Oleh karena itu, apabila kinerja BKD tidak efisien dan efektif, maka akan banyak komplain yang akan dilakukan oleh masyarakat.

Jakarta, 8 Januari 2014

Konsorsium LSM Pemantauan CPNS